



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Minutes of Meeting

Rapat Konsultasi Forum *Multi Stakeholder Group* (MSG)

Hari/Tanggal : Jumat, 07 Mei 2021
Waktu : 09.00 s.d. 12.00 WIB
Agenda : Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan EITI Tahun 2021
Tempat : Video Conference Zoom Meeting
Pimpinan Rapat : Staf Ahli Menteri ESDM bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Resume Hasil Rapat

1. Rapat konsultasi MSG dilaksanakan berdasarkan Undangan Sekretaris Jenderal KESDM, Nomor: 43.Und/DI.02/SJN.D/2021 pada tanggal 4 Mei 2021 secara virtual. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari:
 - a. Pemerintah Pusat: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, SKK Migas.
 - b. Perusahaan dan Asosiasi: Asosiasi Petroleum Indonesia, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, *Indonesian Mining Association*.
 - c. Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Tujuan rapat adalah pembahasan Rencana Kerja Kegiatan EITI Tahun 2021.
3. Sekretaris Jenderal KESDM menjelaskan hal-hal berikut:
 - a. Tim Sekretariat transisi EITI, yang dikoordinir KESDM dengan arahan Menteri ESDM dan dimonitor oleh Staf Ahli Menteri ESDM bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, pada akhir Maret 2021 telah berhasil melakukan publikasi Laporan EITI Indonesia ke-8, melalui situs www.eiti.esdm.go.id.

- b. Tim Sekretariat transisi EITI telah berkorespondensi dengan pihak EITI *International Secretariat* terkait publikasi tersebut sebagai salah satu pemenuhan kewajiban untuk menjaga penilaian Indonesia sebagai anggota EITI *Implementing Countries*.
- c. Dalam waktu dekat ini, ada tugas selanjutnya yang harus kita penuhi yaitu sosialisasi dan diseminasi laporan EITI ke 8 melalui beberapa media komunikasi dan publikasi agar semangat transparansi di sektor industri ekstraktif dapat diinformasikan secara lebih luas ke masyarakat.
4. Tim Sekretariat EITI menjelaskan rencana kerja kegiatan EITI Tahun 2021:
- a. Berikut adalah matriks rencana kerja 2021

Kegiatan	2021			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Laporan EITI-8 2020				
• Publikasi Hasil Laporan				
Laporan EITI-9 2021				
Implementasi EITI				
• Forum Dialog Kebijakan				
• Pengumpulan Data dan Informasi Penyusunan Laporan EITI ke 9				
• Penyusunan Laporan EITI ke 9				
• Implementasi Rekomendasi Validasi 2019 (pre validasi)				
Implementasi Langkah Pengarus-utamaan				
• Langkah Mainstreaming				
• Merancang <i>disclosure</i> di situs web, melakukan seminar di situs web, menyiapkan laporan tahun 2021, menyiapkan kontrak <i>disclosure</i> dan model validasi baru				
• Transisi, peningkatan, dan integrasi platform online EITI, dengan data pemerintah dan Sistem Manajemen Keuangan Publik				

- b. Perkembangan Peraturan EITI, sebagai berikut:
- Tanggal 28 April 2021 telah dilakukan pembahasan RPermen EITI dengan dihadiri oleh Kemenko Ekon, Kemenko Marinvest, Kemenkeu dan Kemenkumham.
 - Masukan dari Kemenkumham untuk merubah RPermen EITI ini menjadi Keputusan Menteri;
 - RKepmen telah selesai disusun dan akan diadakan pembahasan internal dengan Biro Hukum ESDM;
 - Adapun pokok dari RKepmen ini adalah pembentukan tim Forum MSG dan memiliki sifat koordinasi.

Pertanyaan dan Tanggapan dari Peserta Rapat

Pusdatin KESDM

1. Mulai dari 2021-2022 kegiatan EITI ini memiliki dana hibah dari World Bank untuk program *Mainstreaming*.
2. Template kuesioner untuk para perusahaan ke depannya akan dilakukan secara elektronik.
3. Isu-isu strategis akan dibahas di dalam diskusi selanjutnya yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 10x pembahasan.
4. EITI Internasional menawarkan kerja sama terkait: pelatihan penyusunan EITI *workplan* oleh tim EITI *Secretariat*, *Disclosure commodity trading*, mitigasi anti korupsi dengan lembaga internasional anti korupsi, dan tawaran kegiatan *assessment* mengenai dampak EITI terhadap pemerintah Indonesia.
5. Saat ini masih dilakukan proses hibah dari World Bank dan sudah tahap persetujuan Bappenas dan proses di Kementerian Keuangan
6. Akan dilakukan pertemuan selanjutnya terkait pendetailan tahapan kegiatan berdasarkan output yang perlu dicapai di tahun 2021

Kemenko Bidang Maritim dan Investasi

1. Kemenko Marives saat ini sedang menyusun indeks tata kelola sektor pertambangan, diharapkan kegiatan ini dapat di selaraskan dengan pelaporan EITI.
2. *Thematic Policy Dialogues*: Nikel. Industri ekstraktif yang paling masif saat ini adalah Nikel, untuk itu perlu dikendalikan oleh pemerintah. Perlu didiskusikan berapa besarnya sumber daya, cadangan dan idealnya jumlah nikel yang dibutuhkan oleh industri nikel dalam negeri.

Kementerian Keuangan

1. Hal-hal strategis terkait *supply demand* sumber daya alam perlu diperhatikan dan pastikan kembali agar tidak menguntungkan pihak luar.
2. Pemerintah daerah sebaiknya untuk lebih serta aktif dan memahami proses-proses dalam industri ekstraktif.

3. Dana Bagi Hasil sedang tahap perbaikan agar bisa terwujud transparansi DBH untuk daerah.
4. Perlu kiranya dilakukan pendetailan rencana kegiatan 2021 agar terpetakan supporting dari tiap K/L
5. Usulan adanya penambahan isu kesiapan Green Energi pada laporan EITI selanjutnya

PWYP

1. Dalam hasil validasi EITI 2018, Salah satunya terkait tentang workplan. Diharapkan dalam menyusun workplan harus terukur dan dihubungkan dengan prioritas Indonesia dan standar EITI.
2. Perlu ada kegiatan untuk memfollow up bagaimana rekomendasi dan validasi Laporan EITI 2018.
3. *Thematic Policy Dialogues*: Gender dan Benefial Ownership.
4. *MSG Coordination & Monev* ditambahkan Pembahasan isu-isu di industri ekstraktif.
5. Untuk penyebarluasan manfaat transparansi kegiatan Industri Ekstraktif pada daerah penghasil, desiminasi dapat dilakukan pada akedemisi.
6. Setuju dengan tawaran dari Sekretariat EITI tentang kerjasama dan pelatihan penyusunan workplan, mitigasi anti korupsi, commodity trading dan dampak EITI terhadap Indonesia.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia

1. APBI melihat rencana kerja 2021 sudah baik, sudah melibatkan para perusahaan.
2. Tantangan ke depannya adalah bagaimana mengumpulkan data dari para perusahaan baik yang menjadi keanggotaan APBI maupun yang di luar keanggotaan APBI.
3. Dapat melibatkan tim dari perguruan tinggi agar semangat transparansi di sektor industri ekstraktif dapat diinformasikan secara lebih luas ke masyarakat.

--ooOoo--